

Judul : UU TPKS harus terus disosialisasikan
Tanggal : Jumat, 05 Mei 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

UU TPKS Harus Terus Disosialisasikan

PEMERINTAH dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pada 9 Mei 2022. Jelang satu tahun pengesahan UU tersebut, Anggota DPR Puteri Komarudin menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan UU TPKS guna melindungi hak-hak perempuan Indonesia.

Kata Puteri, pengesahan UU TPKS adalah wujud komitmen Pemerintah dan DPR untuk perjuangkan hak-hak perempuan sesuai konvensi internasional CEDAW yang sudah diratifikasi sejak tahun 1984. Perjuangan panjang yang inisiasi dan pembahasannya sejak satu dekade lalu telah menghasilkan UU yang komprehensif.

"Karena tidak hanya meng-kriminalisasi kekerasan seksual, tapi juga mengedepankan langkah pencegahan dan pemulihan bagi korban kekerasan," papar Puteri dalam webinar



Puteri Komarudin

bertajuk *Parliamentary Engagement on CEDAW* yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Parlemen Dunia (Inter-Parliamentary Union/IPU), pada Kamis (27/4/2023).

Dalam keterangan tertulis, kemarin, Puteri memaparkan lebih lanjut bentuk dukungan Pemerintah dan DPR dalam proses legislasi UU tersebut. DPR menginisiasi penyusunan UU ini dan

proses legislasinya memperoleh dukungan penuh seluruh anggota parlemen, perempuan dan laki-laki.

"Tentu, perhatian khusus juga diberikan anggota Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) yang terus memantau pembahasan dan memberikan masukan. Tak hanya itu, kami pastinya juga melibatkan partisipasi aktif kalangan perempuan," ungkap politisi Partai Golkar ini.

Sebagai informasi, selaku negara anggota Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women/CEDAW), Indonesia berkewajiban menyampaikan laporan berkala atas pelaksanaan konvensi kepada Komite CEDAW PBB.

Laporan tersebut dievaluasi oleh Komite CEDAW dan ditutup dengan laporan Observasi Konklusi yang menjabarkan

rekomendasi kebijakan yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah.

Menurutnya, percepatan pembahasan dan pengesahan Undang-Undang TPKS yang dilakukan DPR telah dilakukan sesuai rekomendasi Komite CEDAW.

"Hal ini menunjukkan peran aktif parlemen dalam memastikan terlaksananya Konvensi tersebut, guna memberi jaminan perlindungan penuh bagi perempuan Indonesia," ungkap Anggota BKSAP DPR ini.

Mengapresiasi pencapaian Indonesia tersebut, Wakil Ketua Komite CEDAW PBB Nicole Ameline menekankan peran anggota parlemen perempuan dalam mengimplementasikan Konvensi CEDAW.

Menurutnya, rekomendasi Komite CEDAW memang dibuat sesuai kebutuhan negara tersebut. Pihaknya turut berbahagia dan mengapresiasi

atas pencapaian Indonesia dan kaukus perempuan parlemen atas pengesahan UU TPKS.

"Memang kiprah kerja anggota parlemen perempuan dapat menjadi contoh bagi negara dan dunia untuk memperjuangkan hak-hak perempuan," ujar Nicole.

Menutup keterangannya, Puteri yang juga menjabat Anggota Biro Perempuan Parlemen IPU menjabarkan langkah parlemen ke depan.

Puteri bilang, disahkannya UU TPKS bisa dikatakan kemenangan besar bagi perempuan di Tanah Air. Kendati perjuangan ke depan masih panjang.

"Selanjutnya, DPR bertugas memastikan peraturan pelaksana undang-undang ini segera terbit dan tersosialisasikan dengan baik kepada seluruh masyarakat. Kerja sama dan diskusi dengan Pemerintah dan organisasi masyarakat juga perlu terus dijalin," tutup Puteri. ■ KAL